



KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA UKPBJ

KEMENTERIAN  
LUAR NEGERI



2022

BIRO UMUM

BAGIAN  
LAYANAN  
PENGADAAN



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

# **LAPORAN KINERJA**

# **UKPBJ KEMENTERIAN**

# **LUAR NEGERI**

# **TAHUN 2022**

**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN**  
**BIRO UMUM**  
**2022**

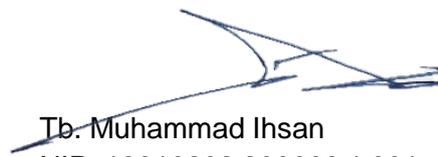
# KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Bagian Layanan Pengadaan sebagai Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan oleh Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum selama tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga dilakukan sebagai bentuk kepatuhan Biro Umum terhadap amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja juga berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan pula perencanaan Kinerja Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum, di masa mendatang lebih meningkat melalui evaluasi atas kendala dan hambatan yang dihadapi.

Jakarta, \_\_\_ Maret 2023  
Kepala Bagian Layanan Pengadaan/  
Kepala UKPBJ



Tb. Muhammad Ihsan  
NIP. 19810202 200603 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>BAGIAN I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
<b>BAGIAN II</b>	
<b>RANGKUMAN EKSEKUTIF</b>	<b>8</b>
<b>BAGIAN III</b>	
<b>DASHBOARD REALISASI PENGADAAN</b>	<b>9</b>
<b>BAGIAN IV</b>	
<b>PENCAPAIAN TARGET KINERJA</b>	<b>12</b>
<b>BAGIAN 5</b>	
<b>ANALISA DAN REKOMENDASI</b>	<b>13</b>
5.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	13
5.2 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	14
5.3 Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	15
5.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	16
Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	16
<b>PENUTUP</b>	<b>17</b>

# **BAGIAN I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Layanan Pengadaan Tahun 2022 yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Layanan Pengadaan memiliki tugas dan fungsi dalam memfasilitasi dan mendukung proses Pengadaan Barang/Jasa Kesekjenan dan seluruh Satker Kementerian Luar Negeri. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bagian Layanan Pengadaan/UKPBJ terus berupaya meningkatkan manajemen kinerja dengan berpedoman pada perencanaan, pengukuran kinerja, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan kaidah yang berlaku.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perencanaan Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri Tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Hasil Pencapaian Kinerja Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai jalur komunikasi atau pelaporan pencapaian kinerja yang dapat digunakan selama satu tahun baik dalam bentuk cetak, sistem informasi online, maupun dalam bentuk presentasi kepada pemangku kepentingan.

### **D. TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN LAYANAN PENGADAAN**

Bagian Layanan Pengadaan merupakan salah satu Bagian pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan Permenlu No .6 Tahun 2021 pasal 133, Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang meliputi persiapan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

Bagian Layanan Pengadaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

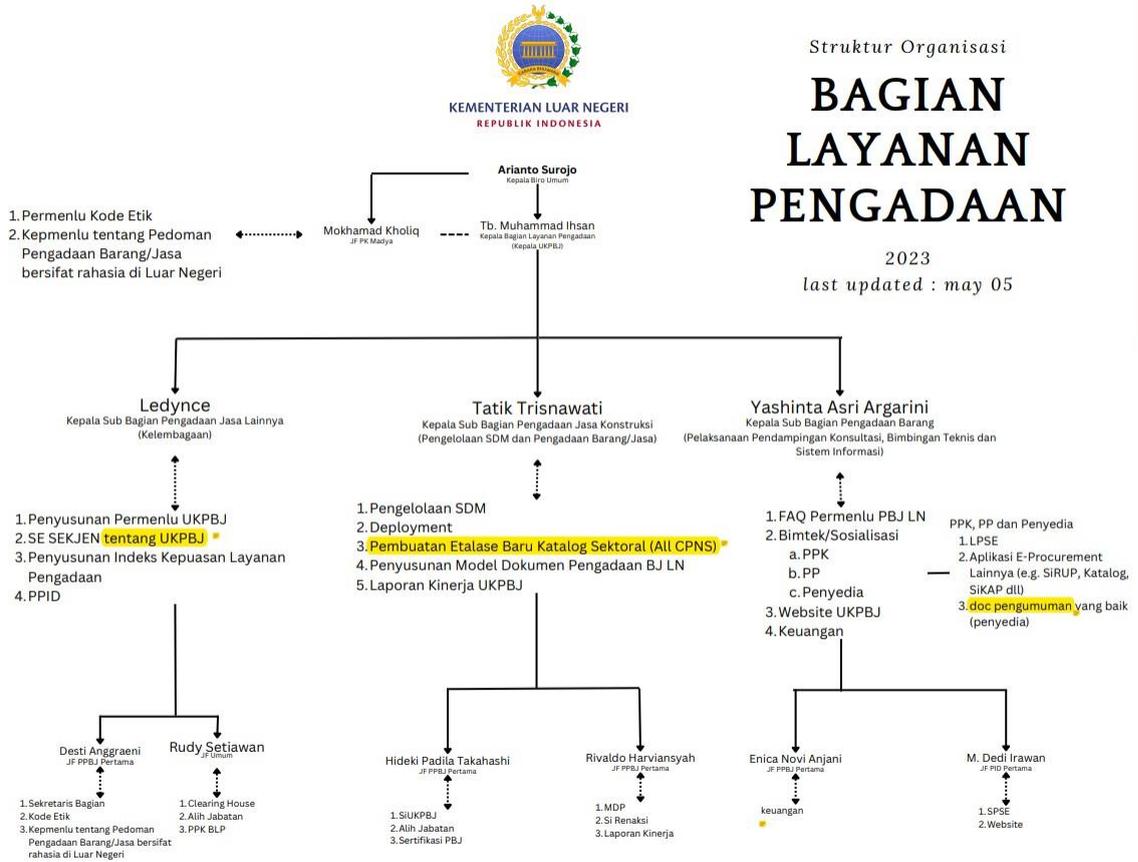
- a. Persiapan dan pelaksanaan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Koordinasi dengan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. Pendampingan konsultasi, sosialisasi, dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Merujuk poin b di atas, fungsi Bagian Layanan Pengadaan berupa koordinasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), karena fungsi LPSE masih berada pada Satuan Kerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 6 Tahun 2021 Pasal 706. Adapun Kepala Bagian Layanan Pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya, menjabat sekaligus sebagai Kepala Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan Permenpan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga, besaran organisasi UKPBJ ditetapkan berdasarkan kriteria yang merupakan penilaian terhadap komponen yang berpengaruh pada beban kerja UKPBJ yang dihitung berdasarkan rata-rata dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Hasil penghitungan ukuran organisasi UKPBJ yang telah dilakukan oleh Biro Umum Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2022, ukuran UKPBJ Kementerian Luar Negeri memiliki nilai 62,19 atau dilaksanakan dalam unit organisasi yang paling tinggi dipimpin oleh jabatan administrator (Kepala Bagian).

## E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Umum terdiri atas, yaitu:



## **BAGIAN II**

# **RANGKUMAN EKSEKUTIF**

Pada Tahun 2022, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 2 (dua) sasaran kinerja yang dijabarkan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut usulan proses pemilihan dari Satker
2. Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa
3. Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa
4. Tingkat kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

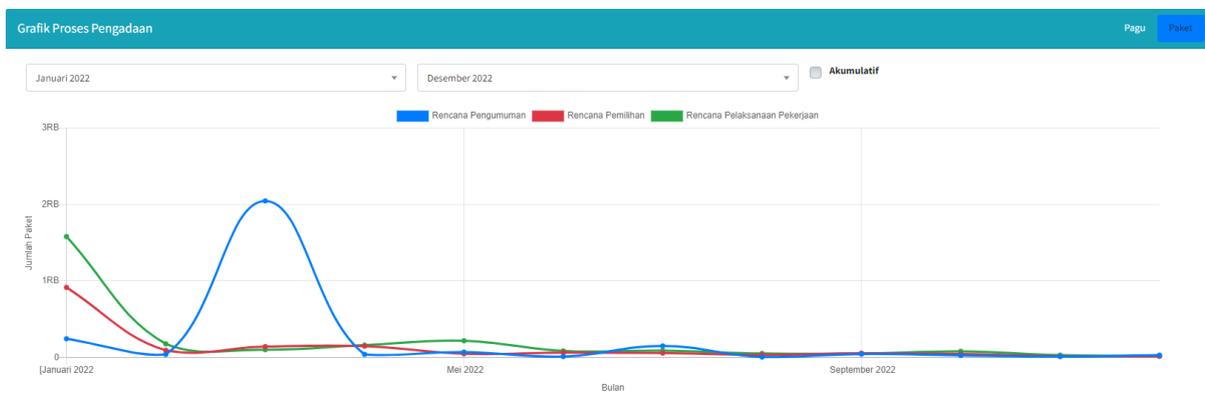
UKPBJ Kementerian Luar Negeri di Tahun Anggaran 2022 telah menyelesaikan Paket Pengadaan Sebanyak 2716 (Paket yang diproses via UKPBJ dan PP/PPK) dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp4.422.549.170.000 dan nilai pagu yang diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebesar Rp963,178,103,823. Kemudian nilai total kontrak sebesar Rp921,203,078,118 sehingga didapat nilai efisiensi sekitar 13,13% juga dilihat dari nilai pagu. Pengukuran kinerja UKPBJ dibagi menjadi 4 (empat) area pengukuran yaitu berupa aspek **waktu**, **biaya**, **kualitas**, dan **tingkat layanan**. Apabila dapat disimpulkan dari nilai pencapaian kinerja di masing-masing IKU sebagaimana disebutkan di atas, layanan pengadaan tahun 2022 telah dilaksanakan dengan cukup baik dan optimal. Namun demikian, pengelolaan kinerja akan terus ditingkatkan dan dievaluasi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan efektifitas layanan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun-tahun anggaran yang akan datang.

## BAGIAN III

# DASHBOARD REALISASI PENGADAAN

Berikut adalah data Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ yaitu Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan yang dikecualikan dan melalui PP/PPK yaitu Pengadaan Langsung dan E-Purchasing telah diselesaikan berdasarkan usulan dari Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2022, berdasarkan **jumlah paket dan pagu anggaran**.

**Tabel 3.1 Grafik Pengadaan berdasarkan Paket**



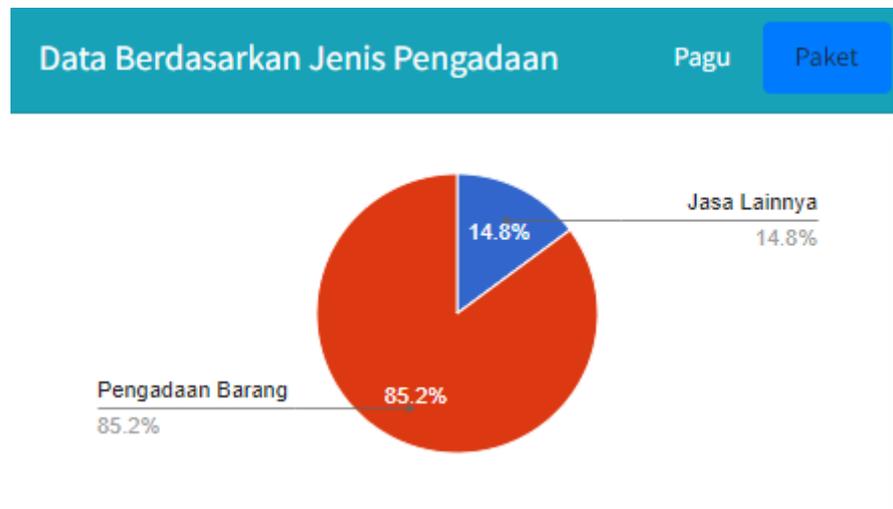
**3.2 Grafik Pengadaan berdasarkan Pagu Anggaran**



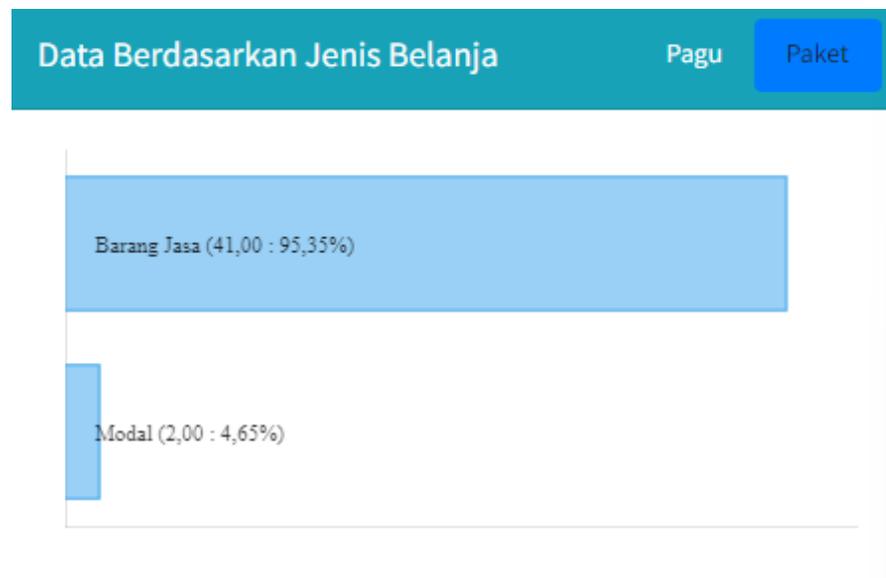
Berikut adalah data Pengadaan Barang/Jasa melalui UKPBJ yaitu Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan yang dikecualikan melalui PP/PPK yaitu Pengadaan Langsung dan E-Purchasing telah diselesaikan berdasarkan usulan dari Unit

Kerja Eselon 2 di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada Tahun Anggaran 2022, berdasarkan **jenis pengadaan, jenis belanja, dan metode pengadaan.**

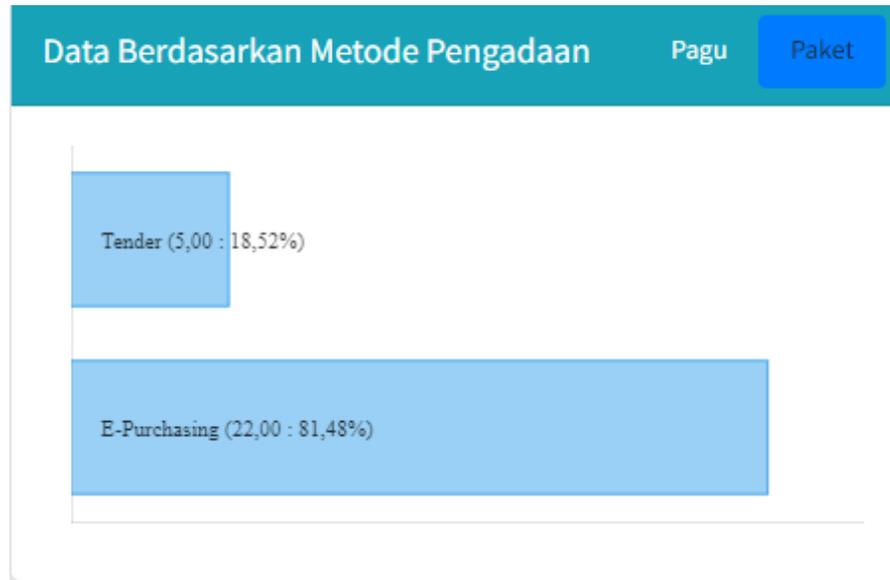
### 3.3 Diagram berdasarkan Jenis Pengadaan



### 3.4 Diagram berdasarkan Jenis Belanja



### 3.5 Diagram berdasarkan Metode Pengadaan



## BAGIAN IV PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Area Pengukuran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kategori	Target 2022	Realisasi 2022	Pencapaian
Waktu	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan	Jumlah Paket	100%	100%	Baik
		Pagu Anggaran	100%	100%	Baik
Biaya	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa	Pagu Anggaran	8%	13,13%	Baik
		Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	8%	5,45%	Baik
Kualitas	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa	-	100%	95%	Baik
Tingkat Layanan	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal	Internal dan Eksternal	4 (skala 4)	4	Baik

# BAGIAN 5

## ANALISA DAN REKOMENDASI

### 5.1 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa											
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan											
Hasil Penilaian	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">Jumlah Paket</th> <th style="width: 35%;">Nilai Pagu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Target</b></td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td><b>Realisasi</b></td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>				Jumlah Paket	Nilai Pagu	<b>Target</b>	100%	100%	<b>Realisasi</b>	100%	100%
	Jumlah Paket	Nilai Pagu										
<b>Target</b>	100%	100%										
<b>Realisasi</b>	100%	100%										
Justifikasi dan Rekomendasi	<p>Berdasarkan data yang ada, dari 2716 paket Pengadaan Barang/Jasa yang diajukan untuk dilaksanakan proses Tender/Seleksi/Tender Cepat/Pengadaan yang dikecualikan dan melalui PP/PPK yaitu Pengadaan Langsung dan E Purchasing, seluruh paket tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Kinerja ketepatan waktu dari Satuan Kerja dapat dilakukan dengan sempurna dengan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan optimalisasi mitigasi risiko-risiko yang mungkin timbul, sehingga usulan paket Pengadaan Barang/Jasa tetap dapat selesai tepat waktu (memenuhi target).</p>											

## 5.2 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Paket Pengadaan

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa							
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa							
Hasil Penilaian			Pagu	HPS				
	<b>Target</b>	8%		8%				
	<b>Realisasi</b>	13,13%		5,45%				
	<b>No</b>	<b>Jenis Pengadaan</b>	<b>Jumlah Paket</b>	<b>Pagu</b>	<b>HPS</b>	<b>Nilai Kontrak</b>	<b>% Pagu</b>	<b>% HPS</b>
	1	Barang	1428	410.107.383.484	397.102.254.321	381.239.212.335	7,03%	3,99%
	2	Jasa Konsultasi	59	48.591.268.788	48.091.112.253	47.895.998.231	1,43%	0,4%
	3	Jasa Lainnya	1011	213.154.238.982	211.125.569.665	209.795.540.679	1,57%	0,63%
	4	Pekerjaan Konstruksi	218	291.325.212.569	283.492.113.325	282.272.326.873	3,10%	0,43%
	<b>TOTAL</b>		<b>2716</b>	<b>963.178.103.823</b>	<b>938.591.263.112</b>	<b>921.203.078.118</b>	13,13 %	5,45%
Justifikasi dan Rekomendasi	Berdasarkan data yang ada, terdapat 2716 paket dengan pagu Rp963.178.103.823 yang telah selesai proses pemilihan dan telah berkontrak. Nilai pagu Kementerian Luar Negeri untuk seluruh Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI di Luar Negeri tahun 2022 sebesar Rp. 4.422.549.170.000 tetapi yang diumumkan di SiRUP hanya sebesar Rp963.178.103.823 atau sebesar 22% dari Pagu yang ada pada tahun 2022, sehingga pada perhitungan diatas hanya mencakup pagu satker pusat dan beberapa perwakilan. Pada tabel diatas dapat							

	<p>dijelaskan bahwa tahun 2022 efisiensi berdasarkan pagu dan HPS yaitu sebesar 13,13% dan 5,45%. dengan selisih 5,13% dari target efisiensi Pagu dan 2,55% dari target efisiensi HPS menunjukkan bahwa belum dapat tercapai efisiensi yang ditargetkan, salah satu penyebabnya adalah proses negosiasi harga dengan penyedia yang sulit, beberapa faktor penyebab lainnya yaitu harga bahan baku meningkat sehingga menghambat proses negosiasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan.</p>
--	--

### 5.3 Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Efektifitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa						
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Keberhasilan Proses Pengadaan Barang/Jasa						
Hasil Penilaian	<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>Jumlah Paket</td> </tr> <tr> <td><b>Target</b></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td><b>Realisasi</b></td> <td>100%</td> </tr> </table>		Jumlah Paket	<b>Target</b>	100%	<b>Realisasi</b>	100%
	Jumlah Paket						
<b>Target</b>	100%						
<b>Realisasi</b>	100%						
Justifikasi dan Rekomendasi	Berdasarkan data yang ada, terdapat usulan paket Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, Barang, dan Jasa Konsultasi yang diajukan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pada Tahun 2022 Realisasi tingkat Keberhasilan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kemlu adalah sebesar 100% dengan target sebesar 100% sehingga IKU telah memenuhi target sesuai dengan ekspektasi.						

#### 5.4 Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal

Objektif Kegiatan	Terwujudnya Kinerja UKPBJ yang Baik						
Indeks Kinerja Utama (IKU)	Tingkat Kepuasan atas Pelayanan UKPBJ secara Internal dan Eksternal						
Hasil Penilaian	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Persentase Kepuasan</td> </tr> <tr> <td><b>Target</b></td> <td>4 (Skala 4)</td> </tr> <tr> <td><b>Realisasi</b></td> <td>4</td> </tr> </table>		Persentase Kepuasan	<b>Target</b>	4 (Skala 4)	<b>Realisasi</b>	4
	Persentase Kepuasan						
<b>Target</b>	4 (Skala 4)						
<b>Realisasi</b>	4						
Justifikasi dan Rekomendasi	<p>UKPBJ menyebarkan kuesioner kepuasan layanan yang mana targetnya merupakan pelanggan/stakeholder internal (KPA, PPK, Pokja Pemilihan) guna mengukur kepuasan pelayanan UKPBJ dalam proses pengadaan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Kuesioner tersebut berisikan 5 pertanyaan dengan rentang nilai kepuasan dari angka 1 hingga 5. Berdasarkan hasil survey tersebut, diperoleh hasil bahwa 89% stakeholder internal menyatakan puas dengan kinerja pelayanan UKPBJ.</p> <p>Pada waktu yang sama, UKPBJ Kementerian Luar Negeri menyebarkan kuesioner kepuasan layanan yang mana targetnya merupakan penyedia guna mengukur kepuasan pelayanan UKPBJ dalam proses pengadaannya. Kuesioner tersebut berisikan 5 pertanyaan dengan rentang nilai kepuasan dari angka 1 hingga 5. Berdasarkan hasil survey tersebut, diperoleh hasil bahwa 85% penyedia puas dengan pelayanan UKPBJ Kementerian Luar Negeri selama penyedia mengikuti proses tender/seleksi/Penunjukan langsung/Pengadaan Langsung tahun 2022</p>						

## **PENUTUP**

Indeks Kinerja Utama di tahun 2022 salah satu diantaranya ada yang belum terlaksana sesuai target, sehingga upaya evaluasi dan perbaikan sistem akan terus dilaksanakan. Namun untuk keseluruhannya, sesuai Kriteria Pencapaian sudah mendapat Kategori Baik (>80). Untuk kedepannya dibutuhkan sinergi dari seluruh penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa (sekretariat UKPBJ), pelaku pengadaan (KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dll.), pimpinan, serta stakeholder di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sangat diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Laporan Pencapaian Kinerja Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2022, sehingga tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.